

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian internal pada tiap perusahaan sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian intern dalam pemerintahan menyangkut tentang peraturan pemerintahan itu sendiri. Sistem pengendalian internal akan selalu melekat dalam setiap kegiatan pemerintahan.¹ Pengendalian internal merupakan indikator awal untuk melihat dan menilai kinerja suatu instansi. Hadirnya sistem ini dapat memudahkan dalam pemberian arahan, pengawasan, mengukur sumber daya dari entitas tersebut, dan membantu untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan oleh pihak tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, memberikan dasar bagi pengendalian internal pemerintah pusat serta daerah, yakni memaparkan, sistem pengendalian internal ialah sebuah urutan yang berlangsung secara integral terhadap pelaksanaan aktivitas secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan kepastian yang layak terhadap pencapaian yang dilakukan instansi yang berjalan secara efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap kekayaan negara, serta taat pada Perpu²

Committee of Sponsoring Organization (COSO) mengartikan sistem pengendalian internal merupakan proses yang bisa terpengaruh oleh manajemen serta karyawan dalam menyajikan tingkat keyakinan yang layak, adapun pencapaian yang didapat dengan objektif dalam penerapan yaitu laporan keuangan yang andal, penerapan efisiensi serta efektifitas dalam aktivitas

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 Ayat 1 dan 2

²Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 "Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah".

operasional perusahaan, serta penerapan perpu yang diberlakukan bagi untuk dipatuhi oleh semua pihak.³

Pengendalian internal perusahaan atau lembaga tertentu akan memberikan pengaruh positif, dengan rekomendasi perbaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebuah sistem bisnis yang tepat serta efektif membutuhkan pemeriksaan menyeluruh. Tanpa sistem pengendalian internal yang tepat, sistem informasi akuntansi tidak bisa memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengaplikasian sistem pengendalian internal yang tidak efektif memiliki pengaruh yang signifikan atas kualitas laporan keuangan sebuah organisasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal perusahaan berperan penting untuk menjaga aset instansi.

Dari uraian di atas bisa diketahui, sistem pengendalian internal berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik pada sebuah organisasi akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kualitas baik. Lingkungan pengendalian internal wajib berjalan dengan baik agar aset suatu instansi bisa terlindungi. Jika pengendalian internal sebuah organisasi tidak baik, maka penyajian laporan keuangan bisa terhambat serta tidak terlindungi dengan maksimal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah bisa dinilai dengan penanda fitur kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan diartikan suatu kualitas laporan keuangan ditentukan oleh indeks kualitatif yang ditunjukkan oleh laporan keuangan tersebut. Relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami adalah kriteria kualitatif pelaporan keuangan pemerintah. Kualitas laporan keuangan terwujud jika informasi yang dihasilkan

³Nida Umun Sulistia, "Analisis Sistem Pengendalian Internal (Spi) Klien Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan", *Accounting Analysis Journal*, 2.Mei (2013), h. 117.

bisa mendukung pengambilan keputusan. Suatu keputusan wajib jelas serta akurat agar yang dihasilkan tepat.⁴

Laporan keuangan pada instansi penting untuk mengevaluasi pencapaian serta niat organisasi di masa lalu, sekarang, serta masa depan.⁵ Untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan pemerintah, suatu entitas wajib mengembangkan sistem yang disebut sebagai sistem pengendalian internal. Lima komponen sistem pengendalian internal berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 ialah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pengamatan. Kelima komponen tersebut di atas diperlukan agar sistem pengendalian internal bisa beroperasi secara efektif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Medan, ialah organisasi pemerintah yang berperan guna menyusun rencana serta program kebijaksanaan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. DP3APM ini terletak di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 112, Kwalda Bekala, Kec. Medan Johor, kota Medan, Sumatera Utara 20142. DP3APM ialah gabungan dari beberapa dinas. Dari beberapa bidang beserta keluarga berencana, kini menjadi satu kesatuan yang di sahkan oleh Walikota Medan.

Dalam Perkembangan DP3APM kota Medan, pada tahun 2021 tepatnya Januari lalu terdapat peraturan baru dari pusat adapun mengenai sistem informasi keuangan. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, masalah yang terjadi pada DP3APM kota Medan diantaranya, pada tahun 2021 ini diluncurkan aplikasi baru ialah SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang sebelumnya sejak 2010-2020 menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SIPD sendiri akan disinkronkan dengan perencanaan serta pelaporan keuangan. Periode

⁴D Maghfirah, 'Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Bima Desa Sawita', 2019, 1-74.

⁵Hendry Andres Maith, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Serta Akuntansi*, 1.3 (2013), h. 620.

penggunaan SIPD ini dengan rentang waktu 2021-2024.⁶ SOP (Standar Operasional Prosedur) SIPD ini sudah dibuat tetapi belum digunakan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan belum bisa dipastikan apakah sudah disajikan sesuai karakteristik laporan keuangan pemerintahan. Kemudian, anggota bagian keuangan DP3APM kota Medan juga sangat sedikit, sehingga perlu diteliti apakah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat sedikit tersebut sistem pengendalian internal di DP3APM berjalan baik. Lalu, sistem pengendalian internal seperti apa yang dilakukan DP3APM dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memuat rumusan masalah pokok, yakni;

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan DP3APM kota Medan?
2. Apakah laporan keuangan DP3APM kota Medan sudah memenuhi karakteristik kualitas akuntansi pemerintahan?
3. Apa Kendala/permasalahan yang di hadapi DP3APM kota Medan dalam menerapkan sistem pengendalian intern?

⁶ AH, ‘Sub Bag Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat kota Medan’, 5 November 2021.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan DP3APM kota Medan
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan DP3APM kota Medan sudah memenuhi karakteristik kualitas akuntansi pemerintahan
3. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang di hadapi DP3APM kota Medan dalam penerapan sistem pengendalian internal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan pada penelitian ini ialah:

1. Bagi Penulis

Pada penelitian ini penulis mendapat pengetahuan baru secara langsung adapun pengoperasian sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas pemerintahan, Perusahaan atau Instansi. Dengan adanya penelitian ini, yang mengakibatkan penulis terjun ke lapangan untuk mengamati, melakukan proses wawancara secara langsung, tentu bisa menjadi perbandingan kesesuaian ilmu adapun pengendalian internal secara teori serta proses penerapannya secara langsung. Selain itu, penelitian ini disajikan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Islam serta Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bagi DP3APM kota Medan

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Medan, penelitian ini menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan, serta bisa mendorong DP3APM untuk lebih baik lagi dalam mengontrol sistem pengendalian internalnya agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

3. Bagi Akademisi serta lainnya

Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan dengan kajian serupa yakni adapun sistem sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Medan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN